



BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 18. TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH
KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2025

BUPATI MAMUJU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu merencanakan penyusunan peraturan kepala daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- b. bahwa perencanaan penyusunan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Mamuju;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KABAG HUKUM	

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2016 Nomor 71, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 7);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2024 Nomor 8);
 8. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	<i>kf</i>
KABAG HUKUM	<i>7</i>

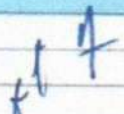
Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah
Kabupaten Mamuju Tahun 2024 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah (Propemperkada) Kabupaten Mamuju Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Propemperkada sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dilakukan penambahan atau pengurangan, dalam hal:
- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas sesuatu rancangan Peraturan Bupati; dan
 - d. perintah dari ketentuan peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperkada ditetapkan.
- KETIGA : Propemperkada sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam DPA Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2025;
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 2 Januari 2025
BUPATI MAMUJU,


SITTI SUTINAH SUHARDI

PARAF HIERARKHI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KABAG HUKUM	

TEMBUSAN: Kepada Yth.

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju.
2. Kepala Biro Hukum Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju.
3. Ketua DPRD Kabupaten Mamuju di Mamuju.
4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Mamuju di Mamuju.
5. Kabag Hukum Setdakab Mamuju di Mamuju.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	<i>fk</i>
KABAG HUKUM	<i>g</i>

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAMUJU
 NOMOR 18. TAHUN 2025
 TANGGAL 2. JANUARI 2025

DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN KEPALA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2025

NO	JENIS	TENTANG	POKOK MATERI	STATUS		PELAKSANAAN/DASAR HUKUM	UNIT/ INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYEMPULAN
				BARU	UBAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Peraturan Bupati	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024	Bab I Ketentuan Umum Bab II Laporan Realisasi Anggaran Bab III Penjelasan Lampiran Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Bab IV Penjabaran Ringkasan laporan Realisasi Anggaran Bab V Penjelasan Lampiran Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran Bab VI Ketentuan Penutup Ringkasan	Baru		1. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKAD	2025
2	Peraturan Bupati	Standar Harga dan Analisis Standar Belanja	a. Standar harga; dan b. Analisis Standar Biaya.	Baru		1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019	BPKAD	2025

PARAF KOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

KABAG HUKUM




	Tahun Anggaran 2026				<p>tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.</p> <p>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.</p>		
3	Peraturan Bupati Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	<p>Bab I Ketentuan Umum</p> <p>Bab II Ringkasan APBD</p> <p>Bab III Penjabaran Anggaran Pendapatan Daerah</p> <p>Bab IV Penjabaran Anggaran Belanja Daerah</p> <p>Bab V Penjabaran Anggaran Pembiayaan Daerah</p> <p>Bab VI . Selisih Pendapatan daerah dengan Belanja Daerah & Pembiayaan Netto</p> <p>Bab VII Penjabaran Lampiran Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)</p> <p>Bab VIII Penjelasan Lampiran Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)</p> <p>Bab IX Penjelasan Pelaksanaan Penjabaran APBD</p> <p>Bab X Ketentuan Penutup</p>	Baru		<p>1. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>3. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah</p>	BPKAD	2025

PARAF KOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

KABAG HUKUM

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

4	Peraturan Bupati	Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2025	Bab I Ketentuan Umum Bab II Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bab III Penjabaran Lampiran Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bab IV Penjelasan Lampiran Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bab V Penjelasan Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Bab VI Ketentuan Penutup	Baru	Ubah	1. PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. 4. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.	BPKAD	2025
5	Peraturan Bupati	Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 31 Tahun 2021	Pokok Materi yakni merubah Pasal 317, Pasal 323, Pasal 326, Pasal 328, Pasal 330 dan mengapus Pasal 324, Pasal 325, Pasal 327, Pasal 329.	Ubah	1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penanaman	1. DPMPPTSP 2. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	2025	

PARAF KOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

KABAG HUKUM

[Handwritten signatures]

		tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah				<p>Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.</p> <p>2. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju.</p>		
6	Peraturan Bupati	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah	Materi rancangan Peraturan Bupati ini pengaturan pengendalian intern pemerintah di lingkungan pemerintah daerah.	Baru		<p>Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.</p>	INSPEKTORAT DAERAH	2025
7	Peraturan Bupati	Pedoman Kinerja Audit Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Materi rancangan Peraturan Bupati ini sebagai acuan untuk melaksanakan audit yang berbasis kinerja atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.	Baru		<p>1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang</p>	INSPEKTORAT DAERAH	2025

PARAF KOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

KABAG HUKUM

[Handwritten signature]

				<p>Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.</p>		
8	<p>Peraturan Bupati</p> <p>Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Intern Di Lingkungan Inspektorat Daerah</p>	<p>Materi rancangan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman pelaksanaan evaluasi intern pemerintah pada Inspektorat Daerah.</p>	Baru	<p>1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008</p>	Inspektorat Daerah	2025

				<p>tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.</p>		
<p>9 Peraturan Bupati</p>	<p>Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 25 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah.</p>	<p>Materi rancangan Peraturan Bupati ini pengaturan mengenai kewajiban dan tata cara penyelenggara negara di lingkungan pemerintah daerah menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada KPK.</p>	<p>Baru</p>	<p>1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah</p>	<p>Inspektorat Daerah</p>	<p>2025</p>

PARAF KOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

KABAG HUKUM

					<p>beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--

PARAF KOORDINASI
 SEKRETARIS DAERAH
 ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
 KABUPATEN KULUM



					4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.			
10	Peraturan Bupati	Pedoman Audit Investigasi di Lingkup Inspektorat Daerah	Materi Muatan rancangan Peraturan Bupati ini: a. Pedoman umum investigasi; dan b. Pedoman teknis investigasi.	audit	Baru	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem	Inspektorat	2025

PARAF KOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

KABAG HUKUM

[Handwritten signatures]

					Pengendalian Intern Pemerintah.		
11	Peraturan Bupati	Pedoman Pemberian Keterangan Ahli di Lingkup Inspektorat Daerah	Materi Muatan rancangan Peraturan Bupati ini: a. pedoman umum pemberian keterangan ahli; dan b. pedoman teknis pemberian keterangan ahli.	Baru	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.	Inspektorat Daerah	2025
12	Peraturan Bupati	Pedoman Rencana Pengendalian Kecurangan Di Lingkup Pemerintah Daerah	Materi Muatan rancangan Peraturan Bupati ini yaitu Pedoman pengendalian kecurangan di lingkup Pemerintah Daerah	Baru	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-	Inspektorat Daerah	2025

PARAF KOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

KABAG HUKUM

dt *4*

13	Peraturan Bupati	<p>Pedoman Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Di Lingkup Pemerintah Daerah</p>	<p>Materi Muatan rancangan Peraturan Bupati ini yaitu Pedoman Penghitungan kerugian keuangan Negara Di Lingkup Pemerintah Daerah</p>	Baru		<p>1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.</p>	Inspektorat Daerah	2025

PARAF KOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

KABAG HUKUM



					2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.		
14	Peraturan Bupati	Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara	Materi Muatan rancangan Peraturan Bupati ini yaitu mengubah beberapa Pasal dalam Peraturan Bupati Mamuju Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara	Ubah	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.	Inspektorat Daerah	2025

PARAF KOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

KABAG HUKUM

f R f

15	Peraturan Bupati	Rencana Kontingensi Bencana Gempa Bumi	Pokok materi Rancangan Peraturan Bupati yaitu Penetapan dokumen rencana kontingensi bencana gempa bumi	Baru	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. 5. Peraturan Nasional Badan Penanggulangan Bencana Nomor 2 	BPBD	2025
----	------------------	--	--	------	--	------	------

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	/
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	/
KABAG HUKUM	/

					Tahun 2023 Tentang Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana		
16	Peraturan Bupati	Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting	Materi muatan rancangan Peraturan Bupati ini yakni : a. penguatan perencanaan dan penganggaran; b. peningkatan kualitas pelaksanaan; c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.	Baru	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang. 2. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting.	DPMD	2025
17	Peraturan Bupati	Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2026	Materi muatan rancangan Peraturan Bupati sebagai berikut : a. Pengalokasian ADD; b. Pembagian ADD;	Baru	1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah,	DPMD	2025

PARAF KOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

KABAG HUKUM

f r y

		<p>c. Penggunaan ADD;</p> <p>d. Mekanisme penyaluran ADD; dan</p> <p>e. Pembinaan dan pengawasan.</p>			<p>terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6</p>	
--	--	---	--	--	--	--

PARAF KOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

KABAG HUKUM

(Handwritten signature)

				<p>Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.</p> <p>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.</p>		
18 Peraturan Bupati	Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025	<p>Materi muatan rancangan Peraturan Bupati sebagai berikut :</p> <p>a. pengalokasian ADD;</p> <p>b. pembagian ADD;</p> <p>c. penggunaan ADD;</p> <p>d. mekanisme penyaluran ADD; dan</p> <p>e. pembinaan dan pengawasan.</p>	Baru	<p>1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang</p>	DPMD	2025

PARAF KOORDINASI
 SEKRETARIS DAERAH
 ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
 KABAG HUKUM

[Signature]

					<p>Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11</p>	
--	--	--	--	--	---	--

PARAF KOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

KABAG HUKUM

(Handwritten signature)

19	Peraturan Bupati	Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026	Materi muatan rancangan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2026	Baru		4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.	DPMD	2025
20	Peraturan Bupati	Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa	Materi muatan rancangan Peraturan Bupati ini yaitu merubah beberapa Pasal dalam Peraturan Bupati Mamuju Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri	Ubah		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri	DPMD	2025

PARAF KOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

KABAG HUKUM




			Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa			Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa		
21	Peraturan Bupati	Pengelolaan Keuangan Desa	Materi pokok rancangan Peraturan Bupati sebagai berikut: a. kegiatan sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa; b. tata cara penyertaan modal; c. kriteria keadaan luar biasa; dan d. pengaturan jumlah uang tunai.	Baru		Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa	DPMMD	2025
22	Peraturan Bupati	Fasilitas Parkir	Materi muatan rancangan Peraturan Bupati ini sebagai berikut: a. penyediaan fasilitas parkir di luar ruang milik jalan; b. penggunaan ruang milik jalan untuk fasilitas parkir; c. pengguna ruang milik jalan; d. penyediaan fasilitas parkir khusus; dan e. sarana parkir.	Baru		Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perparkiran.	Dinas Perhubungan	2025
23	Peraturan Bupati	Satuan Ruang Parkir.	Materi muatan rancangan Peraturan Bupati ini mengatur mengenai ukuran luas efektif untuk meleatakkan suatu	Baru		Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perparkiran	Dinas Perhubungan	2025

PARAF KOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

KABAG HUKUM




			kendaraan (mobil penumpang, bus/truck atau sepeda motor) termasuk ruang bebas dan lebar bukan pintu satuan ruang parkir yang merupakan unit ukuran yang diperlukan untuk memarkir kendaraan menurut berbagai bentuk penyediaannya					
24	Peraturan Bupati	Penyelenggara, Petugas, dan Pengguna Jasa Parkir	<p>Materi muatan rancangan Peraturan Bupati ini :</p> <p>a. Hak dan kewajiban pengguna jasa parkir;</p> <p>b. petugas parkir;</p> <p>c. Tata cara ganti kerugian kendaraan yang hilang atau rusak;</p> <p>d. Kerjasama penyelenggaraan parkir;</p> <p>e. Tata cara mendapatkan izin penyelenggaraan parkir; dan</p> <p>f. Standar pelayanan minimal parkir.</p>	Baru		Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perparkiran	Dinas Perhubungan	2025
25	Peraturan Bupati	Rencana Kerja Pemerintah	Materi muatan rancangan Peraturan Bupati ini menetapkan dokumen Rencana Kerja	Baru		1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem	Bapperida	2025

PARAF KOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

KABAG HUKUM

(Handwritten signature)

	Daerah Tahun 2026	<p>Pemerintah Daerah yang memuat:</p> <p>a. pendahuluan;</p> <p>b. gambaran umum kondisi Daerah;</p> <p>c. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;</p> <p>d. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;</p> <p>e. rencana kerja dan pendanaan Daerah;</p> <p>f. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan</p> <p>g. penutup.</p>		<p>Perencanaan Pembangunan Nasional.</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.</p> <p>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana</p>		
--	-------------------	--	--	---	--	--

PARAF KOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

KABAG HUKUM

[Handwritten signatures]

26	Peraturan Bupati	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025	Materi muatan rancangan Peraturan Bupati ini menetapkan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang memuat: a. pendahuluan; b. evaluasi hasil triwulan II (triwulan kedua) tahun berkenaan; c. kerangka ekonomi dan keuangan daerah; d. sasaran dan prioritas pembangunan daerah; e. rencana kerja dan pendanaan daerah; dan f. penutup.	Ubah	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka	Bapperida	2025

PARAF KOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

KABAG HUKUM

[Handwritten signature]

				<p>Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.</p>		
<p>27 Peraturan Bupati</p>	<p>Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2030</p>	<p>Pokok Materi rancangan Peraturan Bupati yaitu Penetapan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dengan sistematika sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pendahuluan; b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah; c. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah; d. tujuan dan sasaran; e. strategi dan arah kebijakan; f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan; g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan h. penutup. 	<p>Baru</p>	<p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah</p>	<p>Bapperida</p>	<p>2025</p>

28	Peraturan Bupati	Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender	Materi muatan rancangan Peraturan Bupati yaitu penetapan dokumen rencana aksi daerah pengarusutamaan gender	Baru		Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender	Bapperida	2025
29	Peraturan Bupati	Tata Laksana Penerapan Inovasi Daerah	Pokok materi muatan yaitu tata laksana internal Pemerintah Daerah dalam rangka penerapan inovasi daerah	Baru		Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah	Bapperida	2025
30	Peraturan Bupati	Indikator Kinerja Utama Ditingkatkan Pemerintah Daerah	Pokok Materi yaitu: a. penggunaan indikator kinerja utama; dan b. penetapan indikator kinerja utama.			1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. 2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan	Bapperida	2025

PARAF KOORDINASI




SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

KABAG HUKUM

(Handwritten signatures)

				<p>Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/200 7 tentang Pedoman Umum Pendekatan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah</p>		
31 Peraturan Bupati	<p>Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Daerah</p>	<p>Materi muatan rancangan Peraturan Bupati ini sebagai berikut : a. Tata kelola dan manajemen SPBE; b. Penyelenggara SPBE; c. Pemantauan dan evaluasi; dan d. Pendanaan.</p>	Baru	<p>1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang. 3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.</p>	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	2025

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
KABAG HUKUM	

32	Peraturan Bupati	Pedoman Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama	Materi muatan rancangan Peraturan Bupati ini yaitu: a. infrastruktur menara; b. rencana induk menara; c. tata cara pembangunan menara; d. perizinan pembangunan menara; e. pemasangan BTS <i>mobile</i> ; f. pengendalian pengawasan; g. prosedur dan tata cara pelaporan; dan h. sanksi administrasi.	Baru	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	2025
----	------------------	---	--	------	---	---	------

PARAF KOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

KABAG HUKUM




				menjadi Undang-Undang		
33 Peraturan Bupati	Tata Cara Pelaksanaan Pajak daerah dan retribusi daerah	<p>Materi muatan Peraturan Bupati ini :</p> <p>a. Masa Pajak, Tahun Pajak, dan Bagian Tahun Pajak.</p> <p>b. Tata cara memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.</p> <p>c. Administrasi dan Tata Cara Pemberian Kemudahan Perpajakan Daerah.</p> <p>d. Pemberian Insentif Fiskal.</p> <p>e. Tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan pemungutan retribusi.</p> <p>f. Tata Cara Pemungutan PDRD.</p> <p>g. Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi.</p>	Baru	<p>1. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</p> <p>2. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</p>	Bapenda	2025

34	Peraturan Bupati	Besaran Perolehan Tanah	Air	Materi muatan Peraturan Bupati ini mekanisme pengenaan Pajak Air Tanah	Baru	1. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Bapenda	2025
35	Peraturan Bupati	Tata Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan	Cara	Materi muatan Peraturan Bupati ini mengatur mengenai mekanisme pemberian insentif bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan Pemungutan Pajak dan Retribusi diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.		1. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Bapenda	2025
36	Peraturan Bupati	Rencana Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2024	Aksi	Materi muatan Peraturan Bupati ini yakni menetapkan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2024	Baru	1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan	Dinas Perkebunan	2025

PARAF KOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

KABAG HUKUM



				<p>Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.</p> <p>2. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Negara Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia Tahun 2020-2024.</p> <p>3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit</p>		
37 Peraturan Bupati	Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pada Dinas	Materi muatan Peraturan Bupati ini yakni membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Baru	1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18	PPPA	2025

PARAF KOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

KABAG HUKUM

[Handwritten signature]

		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			<p>Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.</p> <p>2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.</p> <p>3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak</p>				
38	Peraturan Bupati	Rencana Tata Wilayah Perencanaan Kawasan Pariwisata Pesisir Barat Karampuang	Detail Ruang	Materi muatan Peraturan Bupati ini: a. tujuan penataan wilayah perencanaan; b. rencana Struktur Ruang; c. rencana Pola Ruang; d. ketentuan Pemanfaatan Ruang; e. peraturan zonasi; dan	Baru		<p>1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan</p>	Dinas PUPR	2025

PARAF KOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

KABAG HUKUM

			f. kelembagaan			<p>1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang</p>	Dinas PUPR	2025
39	Peraturan Bupati	Rencana Tata Wilayah Perencanaan Kawasan Aglomerasi Pendidikan Tinggi dan Pusat Penelitian	Detail Ruang	Materi muatan Peraturan Bupati ini:	Baru			
				<p>a. tujuan penataan wilayah perencanaan;</p> <p>b. rencana Struktur Ruang;</p> <p>c. rencana Pola Ruang;</p> <p>d. ketentuan Pemanfaatan Ruang;</p> <p>e. peraturan zonasi; dan</p> <p>f. kelembagaan</p>				

PARAF KOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

KABAG HUKUM

[Handwritten signature]

					Penyelenggaraan Penataan Ruang		
40	Peraturan Bupati	Remunerasi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah	Materi muatan rancangan Peraturan Bupati ini: a. remunerasi; b. pola remunerasi; dan c. komponen remunerasi.	Baru	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah	RSUD	2025
41	Peraturan Bupati	Tarif Layanan Non Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Fasilitas Kesehatan	Materi muatan rancangan Peraturan Bupati ini: a. kebijakan tarif; b. kegiatan yang dikenakan tarif; c. komponen tarif; d. pola perhitungan tarif; dan e. besaran tarif layanan;	Baru	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah	Dinas Kesehatan	2025
42	Peraturan Bupati	Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat	Materi muatan rancangan Peraturan Bupati ini: a. tujuan; b. Pola Tata Kelola; c. Pengadaan dan Pengangkatan Tenaga Profesional Non ASN; d. remunerasi; e. standar pelayanan minimal; dan f. pembinaan dan pengawasan.	Baru	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah	Dinas Kesehatan	2025

PARAF KOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

KABAG HUKUM

[Handwritten signature]

43	Peraturan Bupati	Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 121 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Rumah Susun Kabupaten Mamuju	Mengubah beberapa Pasal dalam Peraturan Bupati Nomor 121 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Rumah Susun Kabupaten Mamuju	Ubah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Mamuju	2025
----	------------------	--	--	------	---	--	------

PARAF KOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

KABAG HUKUM

[Handwritten signature]

					3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun. 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus.		
44	Peraturan Bupati	Tata Cara Pemberian, Penyaluran Biaya dan Pelaksanaan Bantuan Hukum	Materi muatan rancangan Peraturan Bupati sebagai berikut: a. pemberian bantuan hukum; b. penyaluran biaya bantuan hukum; dan c. pelaporan pelaksanaan bantuan hukum.	Baru	Peraturan Kabupaten Mamuju Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum	Bagian Hukum	2025

BUPATI MAMUJU,

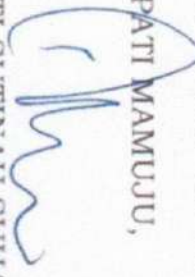


SITTI SUTINAH SUHARDI

PARAF HIERARKHI

Sekretaris Daerah		
Asisten	Bidang	
Pemerintahan dan Kesra		
Kabag Hukum		

				<p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun.</p> <p>4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus.</p>		
44	Peraturan Bupati	Tata Cara Pemberian, Penyaluran Biaya dan Pelaporan Pelaksanaan Bantuan Hukum	Materi muatan rancangan Peraturan Bupati sebagai berikut: a. pemberian bantuan hukum; b. penyaluran biaya bantuan hukum; dan c. pelaporan pelaksanaan bantuan hukum.	Baru	Peraturan Kabupaten Mamuju Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum	Daerah Mamuju Bagian Hukum 2025

BUPATI MAMUJU,

 SITTI SUTINAH SUHARDI

					3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun. 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus.			
44	Peraturan Bupati	Tata Cara Pemberian, Penyaluran Biaya dan Pelaksanaan Bantuan Hukum	Materi muatan rancangan Peraturan Bupati sebagai berikut: a. pemberian bantuan hukum; b. penyaluran biaya bantuan hukum; dan c. pelaporan pelaksanaan bantuan hukum.	Baru	Peraturan Kabupaten Mamuju Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum	Daerah Mamuju	Bagian Hukum	2025

BUPATI MAMUJU,


SITTI SUTINAH SUHARDI